

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh :

FIQRI WARDANA

E051 171 305



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

FIQRI WARDANA

E051 171 305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas

Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Djwanda Nawawi, M.Si

NIP. 19570818 198403 1 001

Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP.19770513 200312 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE
DI KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

FIQRI WARDANA

E051 171 305

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 15 Agustus 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Sekretaris : Rahmatullah. S.IP, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Rahmatullah. S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fiqri Wardana
NIM : E051 171 305
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DRAINASE DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Fiqri Wardana

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Drainase Di Kota Makassar.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini, alhamdulillah.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, usaha keras doa dan disertai dukungan, tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni Ayahanda Sugeng Asrofin dan Ibunda Kartini, Ayahanda Mustari dan Ramlah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan sepenuh hati,

memberikankasih sayang, memberi dukungan baik dari segi materi maupun non- materi yang selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik dimana selalu mengingatkan agar selalu mengingat kepada Allah SWT serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai hingga saat ini.

Kepada saudara penulis yakni Kakak saya Fachri Alamsyah, Kembar saya Fidri Dermawan, Adik saya Ardiansyah, dan Adik saya Siti Mutia Mustaqima, dan Siti Nur Faidah. Teruntuk sepupu penulis yakni Kakak Qadriah Indah Sari, Kakak M Asdar, Kakak Sri Astuti, Kakak Waode Ratna Sari, Rezki Karmila Sari, dan Maulana Sidiq Hasan. Dan juga Kepada Kekasih Tercinta Penulis yakni Adinda Surya Winanti,S.M yang telah berjasa dalam hidup penulis, terima kasih karena selalu ada buat penulis dimana telah memberikan perhatian, bantuan, dorongan, motivasi, doa, serta cinta dan sayangnya yang tak terhingga selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus merah tercinta
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekan lainnya

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif.
4. Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan tambahan ilmu, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulisan skripsi ini hingga mengantarkan penulis mengantungi gelar sarjana, semoga kebaikan selalu menyertai Ibu dan bapak.
5. Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tidak menahu apa-apa menjadi mengerti akan segala hal dengan segala proses yang dilalui sandari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu ada banyak kejutan hidup yang menanti penulis di depan sana, seluruh bekal ilmu yang pernah bapak bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Merampungkan skripsi bukanlah momen mudah yang harus penulis jalani sebagai mahasiswa, semoga kebaikan selalu menyertai bapak.
6. Para tim penguji yang telah memberikan ilmu, masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin.

8. Pak Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap bapak dan ibu sehat dan semangat terus dalam mencari nafkah untuk keluarga tercinta.
10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2017 saudara-saudari teman seperjuangan penulis : Astry, Anna, Aurel, Armi, Apri, Alfa, Adhe, Acoy, Ari, Alam, Bahrul, Dandis, Enil, Farhan, Fadel, Fikri, Hasliana, Ibnu, Ilmi, Maulida, Nanda, Nisa, Ongkel, Onco, Widya, Razak, Syarifah, Sabe, Uni, Ulfi, Widy, Windy, Wawan, dan Yuyu yang telah kebersamai mulai dari mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi

ini dimana semua kisah yang tertata dengan indah terjadi dalam satu masa penulis menyebutnya sebagai kita dimana kita menulis banyak cerita menawan menyatukannya dalam satu kisah dimana kita tertawa lepas tanpa batas berjalan jauh dengan ceria merakit kenangan demi kenangan bersama-sama, dimana kita telah menjadi keluarga di perantauan dengan berbagai macam dinamika yang dialami dan kita jalani bersama hal tersebut kemudian menjadi proses pendewasaan, banyak cerita yang kita lalui namun pergantian masa mulai datang satu-persatu mulai berjauhan, semoga kita tidak pernah lupa dengan pelangi yang pernah ada kenangannya. penulis sangat bahagia bertemu dengan teman-teman semua dan semoga teman-teman akan tetap seperti ini kedepannya.

11. Adinda Surya Winanti S.M yang telah menemani dalam perjalanan penyusunan proposal, penelitian, hingga telah memberikan ide dan gagasannya selama ini sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Untukmu yang saat ini masih membersamai dengan segala kesederhanaan dan menciptakan kondisi yang lebih baik lewat jiwa yang tulus dimana telah menjaga, membantu, menghargai, mengajarkan segala hal, telah bersabar menghadapi kerumitan penulis, telah berbagi cerita, tawa, tangis, keluh dan kesah hal tersebut membuat penulis merasa kuat akan hadirmu. Terima kasih untuk semua waktu yang telah engkau habiskan bersama, sangatlah luar biasa apapun yang engkau lakukan dimana semua hal yang engkau

berikan belum pernah penulis lihat sebelumnya serta dengan segala kekurangan penulis engkau senang mengingatkan tanpa peduli apa yang penulis lakukan. Kau selalu memberikan yang terbaik.

12. Kepada teman-teman BOLANG IPS dan lain-lainnya yang selama ini telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian.

13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Yakni kakanda-kakanda dari Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volkgeist 2010, Enlightmen 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016. Terima kasih telah membantu penulis untuk berkembang di dunia kampus dimana banyak cerita dan ilmu yang bermanfaat, pengalaman berorganisasi dengan proses belajar yang sangat berharga, rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sangat luar biasa diberikan kepada penulis selama berada di Bumi Orange. Dan juga adik-adik tercinta yakni Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019, Maintiendrai 2020. Terima kasih sudah bersama sebaik mungkin, atas kebersamaannya, memberikan kehangatan, menyediakan waktu yang banyak untuk menemani, rasa kekeluargaan yang telah diciptakan, teruslah belajar jangan mudah patah, penulis titipkan amanah selanjutnya untuk menjaga Bumi Orange kita di pundak kalian. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita! Salam Merdeka Militan!

14. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KEMA FISIP Unhas yang telah menjadikan penulis bagian dari kadernya dimana mempertemukan serta memperkenalkan individu-individu dari berbagai jurusan dengan menciptakan keluarga baru dan mengajarkan banyak nilai- nilai kehidupan yang belum pernah penulis dapati sebelumnya. Salam Biru Kuning! Bersama Bersatu Berjaya!
15. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pebaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis hanturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin*

Makassar, 7 Juli 2022

Fiqri Wardana

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.2 Peran Lembaga.....	18
2.3 Peraturan Daerah.....	22
2.4 Dinas Pekerjaan Umum.....	24
2.5 Pengelolaan Drainase.....	26
2.6 Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Sumber data Penelitian.....	34
3.4 Analisis Data.....	35
3.5 Keabsahan Data.....	36
3.6 Fokus Penelitian.....	38
3.7 Informan Penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	41
4.1.1 Geografi.....	41
4.1.2 Visi Misi Kota Makassar.....	42
4.1.3 Pemerintahan.....	47
4.1.4 Demografi.....	49
4.1.5 Nilai- Nilai.....	51
4.2 Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	54
4.2.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	54
4.2.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	54
4.2.3 Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	55
4.2.4 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	55
4.3 Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar.....	60
4.3.1 Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam Perencanaan Drainase di Kota Makassar.....	66
4.3.2 Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam Pengoordinasian Drainase di Kota Makassar.....	70
4.3.3 Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam Pengendalian Drainase di Kota Makassar.....	74
4.4 Faktor- faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar.....	82
4.4.1 Faktor Pendukung.....	83
4.4.2 Faktor Penghambat.....	89
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.1.1 Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Drainase Di Kota Makassar.....	94
5.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar.....	95

5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar.....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota makassar.....	59
Gambar 4.3 Peta Saluran drainase Kota Makassar.....	60
Gambar 4.4 Dokumentasi Pemeliharaan Drainase.....	63
Gambar 4.5 Alur Perencanaan Pembangunan Drainase.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di kota Makassar Tahun 2019.....	48
Tabel 4.2 Jumlah RT dan RW di Wilayah Kota Makassar tahun 2019....	49
Tabel 4.3 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	51
Tabel 4.5 Prioritas Utama Pemeliharaan Drainase di Kota Makassar.....	72
Tabel 4.6 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan Januari.....	79
Tabel 4.7 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan Februari.....	80
Tabel 4.8 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan Maret.....	80
Tabel 4.9 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan April.....	81
Tabel 4.10 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan mei.....	81
Tabel 4.11 Normalisasi Saluran Drainase di Kota Makassar Bulan juni.....	82
Tabel 4.12 Renstra SKPD.....	86

ABSTRAK

Fiqri Wardana, Nomor Induk Mahasiswa E051171305, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Drainase Di Kota Makassar”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.I.P. M.Si, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan dinas pekerjaan umum kota makassar, peran pengelola drainase di kota makassar sesuai dengan peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum yang berlaku. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan drainase di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan drainase di kota makassar cukup baik dengan banyaknya jumlah titik-titik drainase yang diminimalisir dengan pengerukan kembali, tetapi peran masyarakat dalam pengelolaan drainase itu kurang baik karena masyarakat sering kali membuang sampah di saluran-saluran drainase sehingga terjadi penumpukan sampah disetiap titik-titik drainase. Sementara peran Dinas Pekerjaan Umum selaku pengelola drainase di Kota Makassar sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pengelolaan drainase di Kota Makassar.

Kata Kunci : Pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum, Peran Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Drainase, Pelaksanaan.

ABSTRACT

Fiqri Wardana, Student Identification Number E051171305, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "The Role of Local Government in Drainage Management in Makassar City", under the guidance of Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si as Advisor 1 and Mr. Rahmatullah, S.IP. M.Si, as Advisor 2.

This study aims to find out how the service of the Makassar City Public Works Service is carried out, the role of the drainage manager in Makassar City is in accordance with the Makassar Mayor's Regulation Number 84 of 2016 concerning the position, organizational structure, duties and functions as well as the applicable work procedures of the Public Works Service. The type of research used is descriptive qualitative research type, which is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts relating to the problem and unit under study. This study aims to provide a clear description of the role of local governments in the management of drainage in Makassar City.

The results of this study indicate that the implementation of drainage management in the city of Makassar is quite good with the large number of drainage points which are minimized by dredging, but the role of the community in drainage management is not good because people often throw garbage in drainage channels so that garbage builds up. at each drainage point. Meanwhile, the role of drainage management in Makassar City has been carried out in accordance with their respective tupoksi and the implementation of drainage management in Makassar City.

Keywords: Service, Public Works Department, Role of Drainage Manager, Implementation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Permukiman menurut Kuswartoyo 2005 diartikan sebagai perpaduan perumahan dan kehidupan manusia yang menempatinnya. Kawasan permukiman menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu pemukiman yang dihuni oleh banyak manusia (penduduk) adalah kota.

Kota merupakan pusat kegiatan manusia dan menawarkan berbagai kesempatan lebih besar daripada daerah perdesaan. Tidak mengherankan bahwa banyak penduduk pedesaan melakukan migrasi ke kota untuk memperbaiki kehidupannya. Migrasi desa – kota ini menyebabkan penambahan penduduk kota

secara umum kurang lebih dua kali lipat dibandingkan pertambahan penduduk pedesaan. Kota berperan penting dan sangat dominan dalam penghidupan dan kehidupan warganya, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik dan tatanan budayanya. makin besar suatu kota, makin besar pula permasalahan perkotaan yang dihadapinya.

Kota sebagai jantung perekonomian nasional memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan. Kontribusinya sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi warganya; pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, perlu penataan ruang dan wilayah perkotaan. Sebagai akibatnya akan timbul berbagai masalah dalam pengadaan dan penataan ruang untuk permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi, keagamaan, industri, olah raga dan sebagainya (Sutanto, 1995).

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki luas area 175, 77 km² sekaligus ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai Tugas dan Fungsi Organisasi dan tata Kerja Penataan ruang menjadi masalah umum yang terjadi di banyak kota besar dan metropolitan.

Permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi perkembangan kota yang mengalami pertumbuhan pesat, sering lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Sebagai wilayah pemerintahan kota, penataan ruang yang baik adalah penataan ruang yang tidak hanya melakukan penataan tata letak bangunan saja, tetapi juga melakukan penataan jaringan jalan, jaringan drainase, ruang terbuka dan hal lain yang berkenaan dengan kebersihan, kerapian dan keindahan suatu kota. Khusus berkaitan dengan jaringan drainase, penataan ruang yang baik dapat juga meningkatkan kinerja saluran drainase, yaitu saluran yang memiliki dimensi saluran yang cukup mengalirkan debit limpasan air hujan sehingga banjir tidak terjadi. Salah satu masalah yang hadir di wilayah perkotaan adalah penataan serta pembangunan prasarana wilayah, seperti gedung, jalan, pertamanan kota, bahkan saluran drainase yang tidak memperhatikan perilaku alamiah air. Adanya penataan drainase yang tidak sesuai dan tidak memperhatikan kondisi yang ada sehingga dapat menimbulkan banjir. Drainase adalah suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air. Maksud dan tujuan drainase adalah membuang air di atas permukaan tanah yang berlebihan atau

menurunkan atau menjaga muka air tanah agar tidak terjadi genangan, sehingga akibat negatif dengan adanya genangan dapat dihindari (Soehardjono, 1984 : 3).

Kota Makassar berada ditepi pantai Laut Sulawesi tepatnya di Teluk Makassar. Kota Makassar termasuk kota besar dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini yang membawa dampak kepada peningkatan kebutuhan lahan dan permintaan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan prasarana kota yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan seperti degradasi lingkungan dan bencana alam. Salah satu permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya adalah masalah banjir. Hampir setiap tahun bencana banjir di Makassar terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Sebanyak 24 Kelurahan di 6 Kecamatan yang luas wilayahnya mencapai 2761, 84 Ha sering menjadi langganan banjir pada musim penghujan tiba. Beberapa kecamatan di Kota Makasar yang sering dilanda banjir terutama saat musim penghujan yaitu : Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Panakukang. Tidak sedikit kerugian yang di taksir akibat bencana banjir ini, baik itu secara fisik, sosial dan ekonomi. Olehnya itu, drainase merupakan salah satu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, Drainase termasuk dalam salah satu

komponen penting infrastruktur perkotaan yang menanggulangi masalah banjir baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi pada suatu lahan/kawasan sehingga lahan/kawasan tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Air adalah sumber kehidupan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Namun, permasalahan air adalah permasalahan yang tidak kunjung usai. Segala bentuk permasalahannya serta sistemnya patut dijadikan permasalahan utama dalam kehidupan perkotaan, khususnya sistem drainase perkotaan. Banyak yang menjadi permasalahan dan kendala dalam sistem drainase perkotaan. Mulai dari sampah, sungai tercemar, pembuangan limbah di saluran drainase, hingga banjir. Selain itu faktor pertumbuhan penduduk juga ikut memberikan kontribusi dalam permasalahan sistem drainase di perkotaan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang begitu cepat menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan yang awalnya berupa daerah resapan, kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan perdagangan. Dampak yang nyata dari perubahan tata guna lahan tersebut adalah meningkatnya aliran permukaan sekaligus menurunkan resapan air tanah. Selanjutnya akibat yang timbul distribusi air yang timpang antara musim penghujan dengan musim kemarau. Debit banjir meningkat dan ancaman kekeringan semakin nyata. Bencana banjir maupun

kekeringan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan juga memakan korban. Segala permasalahan lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab kita yang harus diselesaikan bersama.

Berdasarkan siklus air, air hujan turun ke bumi kemudian meresap di dalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah ini akan mengalir menuju hilir. Sedangkan air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah, melimpas, menjadi genangan di permukaan atau mengalir ke sungai. Air sungai mengalir menuju hilir atau bermuara di lautan. Siklus ini akan terus berulang hingga air dari penguapan laut turun kembali sebagai hujan. Siklus air alami ini tidak akan menyebabkan permasalahan ketika air tidak "diganggu" alirannya. Gangguan ini dapat berupa pembatasan gerak air, pencemaran lingkungan atau juga pengurangan jumlah air yang meresap ke tanah. Namun, permasalahan saat ini adalah keterbatasan dalam penyediaan jumlah air bersih. Hal ini disebabkan oleh air hujan yang turun ke permukaan tanah, tidak diberi kesempatan untuk meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Akibatnya tanah tidak memiliki cadangan air tanah sehingga mengakibatkan kekeringan. Sementara itu, saat hujan turun jalan-jalan tergenang oleh air hujan atau bahkan luapan air dari saluran drainase. Hal ini disebabkan karena penyempitan dan pengurangan saluran drainase akibat meningkatnya jumlah

penduduk. Permasalahan drainase ini juga diperparah oleh banyaknya sedimentasi tanah dan sampah di saluran drainase dan sungai.

Drainase yang berasal dari kata to drain yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air drainase. Ini merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya. Selain itu juga dapat berupa penyaluran kelebihan air, baik air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya. Air kotor ini berasal dari suatu kawasan yang mengalir menuju bangunan resapan buatan. Sistem drainase juga dapat didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan atau air tanah dari suatu daerah baik secara gravitasi maupun dengan pompa (Sutanto 1992:199).

Pemahaman secara umum mengenai drainase perkotaan adalah suatu ilmu dari drainase yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan. Ini merupakan suatu sistem pengeringan dari pengaliran air di wilayah perkotaan yang meliputi pemukiman, kawasan industri dan perdagangan, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan terbang, instalasi listrik dan telekomunikasi. Selain itu juga termasuk tempat-tempat lainnya yang merupakan bagian dari sarana kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga menimbulkan dampak negatif dan dampak memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia.

Bencana banjir juga sangat berpengaruh ke sektor–sektor lainnya yang mampu menghambat kegiatan pembangunan kota. Drainase termasuk dalam salah satu komponen penting dalam infrastruktur perkotaan yang menanggulangi masalah banjir dan genangan air.

Permasalahan sistem drainase di Kota Makassar masih belum begitu baik alasannya beberapa drainase masih belum terhubung, air hanya berputar dan mengendap sehingga hal ini perlu ditingkatkan dengan menghubungkan drainase tersebut ke saluran utama.

Secara umum alur jaringan drainase di Kota Makassar mengikuti pola jaringan jalan kota yang ada. Sistem pembuangan air hujan masih menjadi satu dengan sistem pembuangan air kotor. Sistem drainase campur ini, kurang menguntungkan untuk daerah yang landai, sehingga terjadi pengendapan dan penggenangan di dalam saluran yang menyebabkan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dipandang mata.

Genangan yang melanda Kota Makassar tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kurang menjaga saluran primer maupun sekunder. Beberapa saluran drainase tersumbat diakibatkan sampah yang menutup saluran drainase dan sedimen yang dapat menghambat laju aliran air hujan. Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah dalam pengaturan tata bangunan

sehingga banyak permukiman di Makassar meninggikan lantainya tidak sesuai dengan aturan (Pemkot Makassar,2014).

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar kian fokus pada penanganan saluran drainase. Terlebih ini sudah memasuki musim penghujan hingga rawan terjadi banjir dan genangan.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh, ada sekitar 27 saluran drainase yang butuh perbaikan. Saluran itu tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Manggala, Biringkanayya, Tamalate, Tamalanrea, Tallo dan Rappocini. Wilayah ini kerap terjadi banjir saat musim hujan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar “**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan Drainase di Kota Makassar ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan, di bidang Pengelolaan Drainase Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pengoordinasian di bidang Pengelolaan Drainase Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian di bidang Pengelolaan Drainase Kota Makassar.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pemerintahan, khususnya kajian yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Drainase.
2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi Pemerintah dalam Pengelolaan Drainase di Khususnya di Kota Makassar.
3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain pada kajian di Bidang

Pengelolaan Drainase.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan kepada orang lain di mana “letak” penelitian. Dalam tinjauan pustaka peneliti perlu meninjau secara kritis data yang perlu ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan persetujuan atau ketidaksetujuan di antara penelitian-penelitian sebelumnya terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Drainase di Kota Makassar. Penulis jabarkan yang nantinya di gunakan dalam menunjang analisis masalah di teliti :

2.1 Peran Pemerintah Daerah

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*persons task or duty in undertaking.*” Artinya “ tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Ralph Linton dalam Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Relasi-relasi yang timbul dari suatu "*status set*" mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Perilaku sebagai ulama berbeda dari perilaku sebagai suami. Robert Merton memakai istilah multiple roles (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari "status set." Misalnya, ulama tadi mempunyai bermacam-macam peranan yang berkaitan dengan banyaknya status. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan role-set. Role-set sebagai utama mencakup peranan-peranan seperti: mengurus masjid, memimpin ibadat, berdakwah, menjadi panutan dan penasehat masyarakat. Sebagai suami ia berperan sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik anak-anaknya, dan lain-lain. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroiti ketegangan intern didalam

tubuh suatu role-set, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang mencirikan tiap-tiap relasi interaksi.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah :Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupa Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.ten dan kota.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan

kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh- kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan

tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.2. Peran Lembaga (*Classical Approaches*)

Henry Fayol merupakan industrialis yang berasal dari Prancis, hidup ditahun 1920-an dapat dikatakan sebagai bapak dari teori manajemen dan operasi modern. Dua hal yang menjadi pemikiran besar dari pemikiran Fayol perhatiannya kepada elemen manajemen dan prinsip-prinsip manajemen. Menurut Fayol pada dasarnya terdapat lima dasar elemen dari manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi dan kontrol.

1. **Perencanaan**, meliputi prediksi masa depan untuk menentukan cara terbaik untuk pencapaian organisasi

2. **Pengorganisasian**, mengenai penataan sumber daya beserta evaluasinya.
3. **Komando**, merupakan elemen dimana manajer menentukan tugas untuk karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. **Koordinasi**, merupakan harmonisasi dari seluruh aktifitas yang terpisah-pisah dari organisasi menjadi satu kesatuan
5. **Kontrol**, meliputi perbandingan antara tujuan dan aktifitas yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa organisasi tetap berjalan sesuai dengan rencana

Implementasi elemen diatas dilakukan dengan Komunikasi, karena dapat dibayangkan bagaimana jika seluruh elemen yang ada jika dilakukan tanpa komunikasi, maka dari itu di dalam manajemen terdapat komunikasi meskipun tidak ada disampaikan secara eksplisit oleh *Henry Fayol*.

Elemen manajemen merupakan "*what*" dari suatu organisasi sedangkan prinsip manajemen membahas "*how*" agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Prinsip manajemen menurut Fayol terdiri dari prinsip struktur organisasi, prinsip kekuasaan dalam organisasi, prinsip penghargaan, dan prinsip sikap organisasi. Berikut adalah sikap organisasi;

1. **Scalar Chain**, Organisasi harus dikelola dalam hierarki vertikal yang jelas dan komunikasi harus dibatasi berdasarkan hierarki ini. Komunikasi terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya.
2. **Unity of Command**, karyawan harus menerima tugas yang jelas dari hanya satu orang atasan

3. **Divison Of Labour**, pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik apabila karyawan diberi tugas dengan jumlah terbatas dan terspesialisasi
4. **Order**, seharusnya ada tempat dan tugas yang pasti bagi setiap karyawan di dalam suatu organisasi
5. **Span Of Control**, Organisasi harus dikelola dalam hierarki vertikal yang jelas dan komunikasi harus dibatasi berdasarkan hierarki ini. Komunikasi terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya.

Enam prinsip tersebut menunjukkan bahwa organisasi akan menjadi sebuah organisasi yang berstruktur tinggi dan berjenjang. Meskipun Fayol menekankan pada komunikasi vertikal tetapi ia juga menemukan komunikasi horisontal yang melintasi hierarki. Inilah yang disebut oleh Fayol sebagai "*gankplank*" yang secara horisontal akan menghubungkan karyawan pada hierarki yang sama. *Gankplank* ini akan terjadi apabila diperbolehkan oleh manajer atau jika antar karyawan berkomunikasi untuk menyelesaikan tujuan bersama organisasi. Prinsip kekuasaan dalam organisasi adalah sebagai berikut;

1. **Sentralisasi**, Organisasi akan lebih efektif ketika manajemen pusat memiliki kontrol kepada pengambilan keputusan dan aktivitas karyawan. Meskipun demikian Fayol percaya bahwa adanya hubungan atau faktor ketergantungan antara ukuran organisasi dan karakteristik personal masing-masing manajer dan karyawan yang dapat mempengaruhi optimalisasi level sentralisasi.

2. **Otoritas dan Tanggung Jawab**, Organisasi akan lebih efektif ketika manajemen pusat memiliki kontrol kepada pengambilan keputusan dan aktivitas karyawan. Meskipun demikian Fayol percaya bahwa adanya hubungan atau faktor ketergantungan antara ukuran organisasi dan karakteristik personal masing-masing manajer dan karyawan yang dapat mempengaruhi optimalisasi level sentralisasi.
3. **Disiplin**, Seluruh anggota organisasi harus patuh kepada aturan organisasi dan kepada manajer yang menegakkannya.

Berdasarkan prinsip ini Fayol menyatakan bahwa kekuasaan harus dipusatkan pada manajer, pada mereka yang memegang otoritas dan tanggungjawab. Seluruh karyawan yang ada dalam struktur kekuasaan ini harus mengikuti aturan dan perintah yang diberikan oleh manajer. Berikut adalah prinsip penghargaan dalam organisasi sebagai berikut;

1. **Remuneration of Personnel**, Karyawan seharusnya diberikan penghargaan atas pekerjaan mereka dengan gaji dan bonus (salary and benefit) yang memadai.
2. **Equaty**, pemberian upah harus adil, tidak ada pemerasan dan demikian pula dari pihak karyawan harus membalasnya dengan prestasi kerja yang baik.
3. **Tenure Stability**, Penghargaan yang dapat diberikan kepada karyawan berupa waktu, jabatan, bonus, pembagian keuntungan dan penghargaan lainnya yang tidak berbentuk uang.

Sedangkan yang terakhir adalah menurut Henry Fayol, mengenai prinsip dan sikap organisasi;

1. **Subordinasi dari keinginan individu kepada keinginan individu,** Organisasi dapat efektif apabila karyawan memahulukan kepentingan dan tujuan organisasi di atas kepentingan individu.
2. **Inisiatif,** Dimaksudkan sebagai upaya manajer untuk dapat menilai dan mengarahkan upaya karyawan untuk bekerja sebaik mungkin bagi kepentingan organisasi.
3. **Esprit De Corps,** Mengharapkan para anggota dalam organisasi memiliki semangat terhadap organisasi dan tidak ada pertentangan di antara mereka. Boleh dikatakan prinsip yang digunakan di sini adalah *“all for one and one for all”*.

2.3. Peraturan daerah

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

- 1) Memihak kepada kepentingan rakyat,
- 2) menunjung tinggi hak asasi manusia dan,
- 3) berwawasan lingkungan dan budaya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusi)

untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip

dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

2.4.Dinas Pekerjaan umum

Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
- b) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;

- d) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- e) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah. (Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Jalan Lingkungan.
- 4. Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :
 - a. Seksi Sanitasi dan Air Bersih;

- b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;
 - c. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah.
5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase;
 - c. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase.
6. Bidang Bina Teknik, terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan dan Desain;
 - b. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi;
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.5. Pengelolaan Drainase

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan

biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*.

Drainase berasal dari bahasa Inggris “*drainage*” yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan air. Drainase juga dapat diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas (Suripin, 2004:3).

Drainase adalah suatu cara pembuangan kelebihan air yang

tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air. Maksud dan tujuan drainase adalah membuang air di atas permukaan tanah yang berlebihan atau menurunkan atau menjaga muka air tanah agar tidak terjadi genangan, sehingga akibat negatif dengan adanya genangan dapat dihindari (Soehardjono, 1984 : 3).

Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis. Drainase perkotaan adalah sistem prasarana drainase dalam wilayah kota yang intinya berfungsi selain untuk mengendalikan dan mengalirkan limpasan air hujan yang berlebihan dengan aman, juga untuk mengendalikan dan mengalirkan kelebihan air lainnya yang mempunyai dampak mengganggu dan/atau mencemari lingkungan perkotaan, yaitu air buangan atau air limbah lainnya. (Hardjosuprpto,1999:6).

1. Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. Sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
2. Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.

3. Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
4. Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

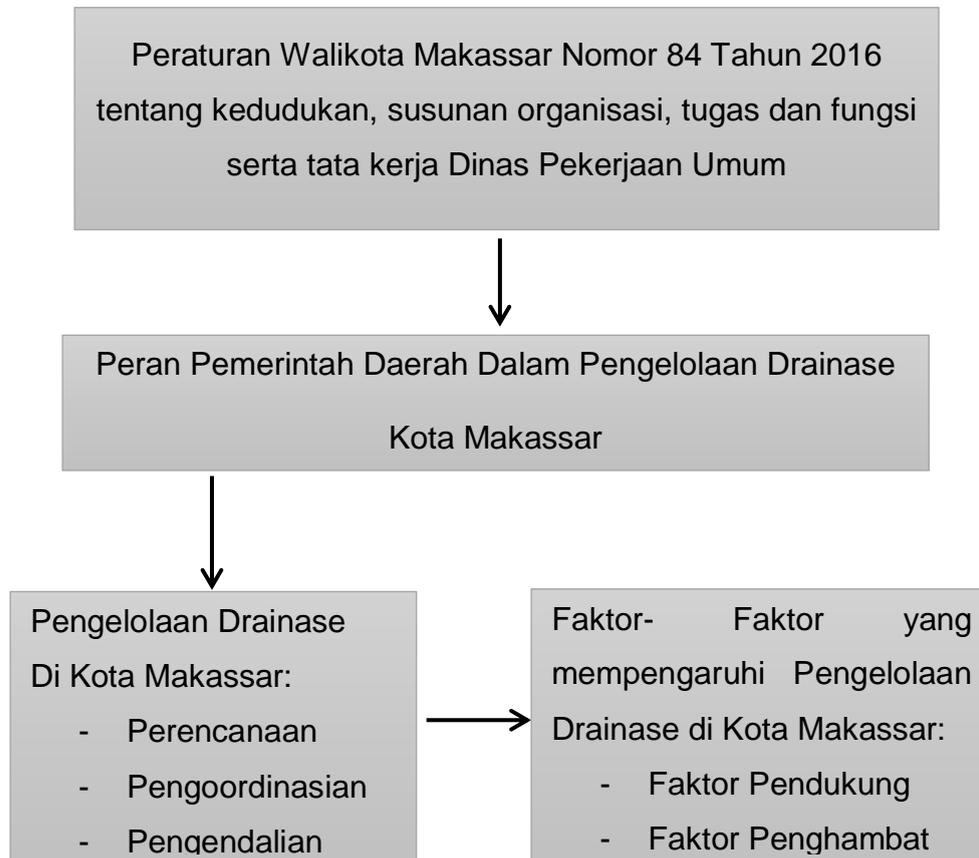
2.6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bagian Kelima Pasal 17 ayat 1 yaitu Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pemeliharaan, pembangunan dan pengendalian menjadi masalah umum yang terjadi di banyak kota besar dan metropolitan terhadap Pengelolaan Drainase.

Beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka

dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual:



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana Pengelolaan Drainase di Kota Makassar dalam perjalanan Peraturan Walikota Makassar No. 84 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Drainase .Agar dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil eksplorasi pengelolaan drainase di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan agar berusaha menelaah secara cermat, sistematis terhadap fenomena empirik aktual mengenai pengelolaan drainase di Kota Makassar. Adapun komponen yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penelitian antara lain;

3.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.